

Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia

Ardyantha Sivadabert Purba
Email: ardyanthapurba@yahoo.com

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang perjalanan demokrasi Indonesia dan permasalahan demokrasi Indonesia menurut kacamata para akademisi di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) UGM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa bagaimana perkembangan demokrasi dari awal reformasi sampai saat ini. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori Third Wave Democracy dari Samuel P. Huntington untuk dapat menganalisa perjalanan demokrasi di Indonesia dan dapat menyajikan pandangan terkini mengenai riwayat demokrasi Indonesia. Hasil penemuan ini menemukan bahwa demokrasi akan tercapai apabila rejim otoriter berakhir, rejim demokratis dibentuk dan dibangun serta munculnya konsolidasi rejim demokrasi. Para akademisi di JSP pun memandang permasalahan demokrasi dengan dimensi yang sudah diperkirakan oleh Huntington yaitu demokrasi dimensi civil society, demokrasi dimensi militer, demokrasi dimensi sistem politik, dan pandangan demokrasi media informasi.

Kata kunci: Demokrasi, *Third Wave Democracy Theory*

Abstract

This thesis discusses the journey of democracy in Indonesia and Indonesian democracy issues in the eyes of the academics in the Journal of Social and Political Sciences (JSP) UGM. This study used qualitative methods and aims to analyze how the democratic development of the early reforms to date. Therefore, researchers using Third Wave of Democracy theory of Samuel P. Huntington to be able to analyze the journey of democracy in Indonesia and can present the latest views on the history of Indonesian democracy. These results find that democracy will be achieved when the authoritarian regime ended, democratic regime established and built as well as the emergence of consolidation of democratic regimes. The academics in the JSP was looking at the problems of democracy with dimensions that have been predicted by Huntington that democracy dimension of civil society, democracy, the military dimension, the democratic dimension of the political system, and view information media democracy.

Keywords: Democracy, *Democracy Third Wave Theory*

Latar Belakang Masalah

Diskursus seputar sistem politik negara bernama demokrasi seakan tiada habisnya. Terbukti, pada abad ke 21 yang dikenal sebagai abad kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, demokrasi masih menjadi pilihan utama berbagai negara di belahan dunia. Bahkan bisa dikatakan, demokrasi menjadi virus yang mampu untuk menasbihkan dirinya menjadi satu-satunya sistem terbaik yang pernah ada. Hal ini jelas dapat terjadi dikarenakan peran amerika serikat yang muncul sebagai pemenang perang dingin yang terus melakukan propaganda dan kampanye secara berkelanjutan yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem satu-satunya yang mampu untuk membawa kemaslahatan negara terhadap rakyatnya. Diterimanya demokrasi sebagai sistem terbaik dari sebuah negara hanya karena demokrasi mampu untuk menyatukan kemajemukan seluruh golongan dan berprinsip agar seluruh rakyat di suatu negara dapat hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya diskriminasi ras, agama maupun golongan.

Kata “demokrasi” selalu menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat sipil, mulai dari masyarakat yang sedang cangkrukan di warung sampai dengan level masyarakat elit terutama di kalangan politisi dan bisa dipastikan menjadi konsumsi publik sehari-hari di negeri ini. Selain itu, demokrasi seakan-akan tidak lagi menjadi hal yang ambigu dan patut untuk diteliti lebih jauh lagi, apalagi pasca pembukaan *kran* demokrasi melalui reformasi 1998 yang dibuka seluas-luasnya, dan siapapun bisa mengakses untuk mengamati dan terjun langsung didalamnya.

Dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri demokrasi bukanlah merupakan hal yang baru diterapkan dalam sistem kenegaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, dalam perjalanan kemudian demokrasi tidak jarang menuai beragam hambatan atau bahkan ancaman. Salah satu ancaman terbesar yang sedang dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini adalah keputusan terhadap demokrasi itu sendiri yang belum berbanding lurus dengan tujuannya, serta melemahnya kekuatan gerakan demokrasi dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang anti demokrasi.

Perjalanan demokrasi sendiri di Indonesia mengalami pasang-surut sejak awal lahirnya Republik ini hingga sekarang. Secara singkat, pasang surut demokrasi di Indonesia ini berkaitan erat dengan tingkah laku para elitnya, apakah mereka berhati lapang atau malah mereka sangat picik dan tidak bertanggungjawab. Sikap miopik dan parokial ini terutama bersumber pada kondisi lemahnya kultur ke-negarawan-an yang dianut oleh sebagian besar politisi di Indonesia (Kartodirdjo, 1986: 28).

Indonesia sangat beruntung dikarenakan sejak awal mulanya berdiri, masyarakat sudah memilih untuk menganut sistem politik demokrasi untuk mengatur negara yang baru lahir. Penduduknya yang mayoritas muslim pun hampir tidak ada yang alergi dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini tidak dapat dipungkiri berkat adanya didikan secara *kontinyu* yang diberikan oleh para pemimpin Indonesia saat itu (*the founding fathers*). Kenyataan ini merupakan modal yang sangat penting untuk dikembangkan dengan cara yang lebih bertanggungjawab dan elegan. Adapun hasilnya masih belum seperti dengan yang diharapkan karena adanya kesalahan dan kelemahan pemimpin negara ini dalam berpolitik. Upaya untuk perbaikan sistem ini sejatinya harus secara terus-menerus dilakukan tanpa harus merasa bosan dan putus asa, sekalipun pada kenyataannya hasilnya sering menyakitkan dan melelahkan.

Pasca reformasi, BJ. Habibie selaku presiden pada waktu itu memiliki peranan yang cukup besar dalam memberi ruang yang luas bagi perkembangan demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari desakan sebagian besar rakyat Indonesia akibat akumulasi kekecewaan terhadap rezim otoriter Soeharto. Melalui pintu demokrasi yang terbuka lebar juga, kekuasaan eksekutif Habibie tidak dapat dipertahankan pada SUMPR 1999. Reformasi 1998 dengan demokratisasi sebagai agenda utamanya telah membuka babak baru sekaligus menjadi titik balik dalam konstalasi politik nasional menuju ke arah yang lebih sehat, yakni demokratis dan terbuka.

Terpilihnya Gus Dur dan Megawati secara mengejutkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada SU MPR 1999 memberikan kepastian bahwa roda demokratisasi akan terus bergerak. Terlepas dari berbagai manuver politik yang mengkhawatirkan kehidupan demokrasi, tindakan politik Gus Dur selaku Presiden RI sangat bermakna dalam mematangkan watak dan gerakan demokrasi di tengah kebuntuan demokrasi di masa-masa sebelumnya. Kesadaran yang mendalam dari segenap elemen bangsa dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi yang baik, telah menyelamatkan bangsa kita dari bahaya disintegrasi akibat perbedaan pandangan politik yang tajam.

Harus diakui bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan yang berarti dipandang dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hingga Pilkada langsung dapat berjalan dengan bebas, transparan, demokratis, dan dalam suasana damai. Kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), kebebasan berserikat (*freedom of assembly*) dan kebebasan press (*freedom of press*) terasa jauh lebih baik dibanding pada zaman Orde Baru (Said Ali, 2009 : 99).

Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut mengakibatkan terciptanya harapan besar masyarakat untuk adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibanding pada masa sebelumnya (orde baru), serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Namun demikian, dalam realitas harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan-pun nyaris seperti Orde Baru, sementara sirkulasi elit politik nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku yang mendasar.

Di sisi lain, tiga belas tahun sudah reformasi bergulir ternyata belum mampu membawa bangsa ini keluar dari jeratan krisis multidimensional. Di era transisi ini, rakyat memang bisa menghirup udara kebebasan berpolitik tanpa harus khawatir adanya intimidasi dari korps berseragam loreng. Dua kali pemilu dilaksanakan dan tiga kali terjadi pergantian presiden, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun faktanya secara substantif belum mampu membawa rakyat beranjak dalam taraf kesejahteraan. Rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, angka pengangguran semakin membengkak, hutang luar negeri makin menumpuk dan budaya korupsi menjadi momok utama buat elite-elite politik di negeri ini.

Pada level formal-prosedural proses demokratisasi di Indonesia yang menggelinding sejak reformasi 1998 sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Mulai dari amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah secara langsung dan pembentukan beberapa institusi demokrasi menjadi landasan yang memadai untuk menopang

proses pembaharuan politik dan pelembagaan demokrasi di Indonesia. Amandemen keempat UUD 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam BAB VIIA pasal 22C-22D, Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam BAB IX pasal 24C-25, Komisi Yudisial (KY) diatur dalam BAB IX pasal 24B dan beberapa Komisi Negara lainnya (Pasca Amandemen yang keempat, UUD RI 1945). Tradisi politik baru yang lebih demokratis sudah mulai tumbuh, lembaga-lembaga politik juga mulai ditata lebih baik yang memungkinkan terjadinya percepatan proses konsolidasi demokrasi.

Akan tetapi, lahirnya kultur politik dan institusi-institusi politik demokratis yang tercermin dalam pemilihan presiden langsung, amandemen UUD 1945, dan lain sebagainya tidak berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Secara substansial, kehidupan masyarakat terutama menyangkut kesejahteraan tidak kunjung membaik. Terbukti dengan angka pengangguran yang tidak bisa ditekan, bahkan meningkat. Hasil pusat statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004 menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 9,5 juta pengangguran terbuka. Jumlah ini diukur berdasarkan ukuran satu jam bekerja selama seminggu. Artinya, jumlah pengangguran yang sesungguhnya, berdasarkan kebutuhan wajar untuk bekerja jauh lebih banyak.

Sepenuhnya kita menyadari bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang abadi dan sangat fluktuatif, ia dapat berdiri atau terbaring menang atau kalah, namun tidak akan pernah mati. Karena demokrasi adalah sistem nilai yang menjadi roh dari jiwa-jiwa merdeka yang akan senantiasa hidup sepanjang masa. Sejarah bangsa yang telah membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak pernah mati. Perlawanan rakyat yang menuntut hak-hak dasar politiknya terhadap rezim otoriter Soekarno maupun Soeharto adalah bukti bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar bisa dimusnahkan. Ada masa pasang dan surut kehidupan demokrasi, sebagaimana kita alami hingga hari ini.

Sistem demokrasi tentu tidak selalu menyenangkan bahkan terkadang menyakitkan, sebab dalam proses demokrasi senantiasa menghasilkan kemenangan dan kekalahan. Sikap seorang demokrat sejati akan terlihat di saat ia menghargai kemenangan kelompok lain maupun saat menerima dengan lapang dada atas kekalahannya. Sekalipun banyak cara dan jalan menuju demokrasi, namun hasil demokrasi tidak memberikan pilihan yang banyak. Penghargaan kepada yang menang dan kalah dalam suatu kontestasi politik merupakan kemenangan yang gemilang bagi demokrasi.

Sangat beragam pendapat para pakar politik tentang konsep dasar demokrasi dari teori politiknya. Mengingat sejarah politik banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak akademi Plato sampai institusi pendidikan besar masa kini studi politik selalu mendapat sambutan hangat dan tempat yang terhormat.

Ketika genderang reformasi ditabuh oleh mahasiswa dan berbagai elemen bangsa pada tahun 1998, pada saat itulah kajian-kajian mengenai sistem demokrasi yang tepat guna dan efektif untuk membawa arah Indonesia pasca orde baru turut meledak. Banyak sekali elemen-elemen masyarakat sipil, mulai dari dosen, peneliti, jurnalis, hingga aktivis organisasi ekstra kampus berupaya untuk meracik ramuan demokrasi yang pas untuk Indonesia. Untuk meramu sistem demokrasi jelas dibutuhkan ahli-ahli bidang sosial politik yang *capable* dan mampu secara jeli untuk memahami kajian serta prinsip-prinsip dasar demokrasi di segala lini entah itu sistem politik, kelompok masyarakat, tugas pokok fungsi militer, independensi dan kebebasan media, dll. Manusia-manusia yang memiliki kapabilitas itu jelas harus berasal dari kalangan akademisi sosial politik karena mereka-merekalah yang mampu secara teoritis

merumuskan porsi-porsi yang pas untuk demokrasi Indonesia dan bisa melakukan *research* ke *grassroot* mengenai budaya kultur di Indonesia bila dihadapkan dengan sistem demokrasi.

Ada banyak sekali universitas-universitas di Indonesia yang memiliki fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dan mereka rata-rata juga memiliki akademisi-akademisi yang sangat baik dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Tetapi tidak untuk mendeskreditkan salah satu pihak, universitas yang memang sudah terkenal sebagai universitas nomer satu di Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik entah dalam kajian, penelitian, pendidikan dan kultur akademisnya adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Universitas Gadjah Mada atau biasa disingkat UGM memiliki wadah resmi untuk memfasilitasi penyaluran aspirasi, hasil diskusi, advokasi dan pemutakhiran gagasan dari para ilmuwan sosial politik di Indonesia yang salah satunya adalah Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau JSP. JSP yang terbit di bulan maret, juli dan november setiap tahunnya merupakan salah satu naskah akademik yang menjadi tolak ukur dalam setiap permasalahan sosial dan politik di Indonesia. Sejak awal munculnya JSP pada tahun 1997, JSP sudah berhasil membuat 17 volume jurnal yang dibagi dalam 3 nomer penerbitan yang sesuai dengan bulan terbitnya.

JSP sebagai wadah penyaluran aspirasi, publikasi hasil diskusi, advokasi dan pemutakhiran gagasan tentang ilmu sosial dan ilmu politik berhasil menghasilkan produk yang baik dan berkelanjutan mengenai permasalahan sosial dan politik di Indonesia, termasuk salah satunya mengenai kajian demokrasi. Para akademisi yang dapat menerbitkan karyanya lewat JSP jelas sudah mengalami seleksi yang sangat ketat oleh penerbit JSP karena banyaknya tulisan yang juga mengantri untuk di terbitkan oleh JSP sehingga jurnal yang diterbitkan oleh JSP jelas sudah terjamin kualitas dan independensinya, sehingga dapat menjadi wadah yang tepat untuk para akademisi di Indonesia merumuskan segala permasalahan tentang sosial politik di Indonesia, terutama dalam fokus penelitian tentang demokrasi Indonesia.

Penulis ingin melihat persoalan demokrasi sebagai sistem politik dan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini dijadikan sebagai landasan untuk melihat persoalan politik Indonesia ke arah yang lebih filosofis. Artinya landasan teoritis apakah yang kemudian dijadikan dasar menerima demokrasi sebagai sistem politik paling tepat untuk Indonesia? Bagaimana sebenarnya pemaknaan demokrasi itu sendiri?

Sebelum dibahas lebih jauh, penulis ingin menegaskan bahwa akan sangat merepotkan, ketika penulis harus melihat persoalan politik pada tematemanya besar seperti di atas. Maka penulis mengambil alternatif kajian melalui studi pemikiran terhadap akademisi yang memiliki basis akademis dalam dunia politik khususnya di Indonesia, baik secara intelektual maupun pengaruhnya dalam perkembangan politik kebangsaan. Oleh karena itu penulis memilih seluruh penulis jurnal tentang kajian demokrasi di JSP mulai periode paling awal (1997) sampai yang terbaru (2013) sehingga dengan menganalisis jurnal-jurnal yang ditulis oleh para akademisi yang tulisannya sudah dipercaya untuk terbit di JSP, kita akan mendapati gagasan-gagasan terbaru tentang kajian demokrasi.

Pengertian Demokrasi

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata Yunani merupakan gabungan dari kata *demos* yang

berarti rakyat dan kratos/kratein yang berarti berarti kekuasaan atau berkuasa yang apabila diartikan menurut pengertian modern yakni “rakyat berkuasa” atau “government are rule by the people”.

Sesudah perang dunia II kita melihat gejala bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka “*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organiations advocated by influential proponents*” (Urbinati, 2006 : 17).

Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau mempunyai dua atau banyak arti, sekurang-kurangnya ada *ambiguity* atau ketaktentuan “*either in the institutions or devices employed to effect the idea or in the cultural or historical circumstances by which word, idea and practice are conditioned*” (Urbinati, 2006 : 17-18).

Tetapi di antara sekian banyak aliran fikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu aliran yang menyebut dirinya “demokrasi”, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme (Budiardjo, 1988 : 51). Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari daratan Eropa, tetapi ketika perang dunia II berakhir, nampaknya negara-negara baru di Asia juga mendukung. Negara seperti India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu R.R.C., Korea Utara, dan sebagainya.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu: (1). Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). (2). Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan dua istilah *rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, adalah demokrasi konstitusional. Disamping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (Budiardjo, 1988 : 51-52).

Ruang Lingkup Demokrasi

Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi tidak bisa dilepas dari dua sisi di atas yaitu substansi dan prosedur, yakni prosedur sebagai cara untuk mencapai substansi sehingga keduanya tidak saling menegasikan, serta berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, demokrasi dapat tumbuh dan berkembang jika substansi dan prosedur berjalan beriringan.

Samuel Huntington mengidentifikasi tiga gelombang demokratisasi dalam sejarah manusia (Huntington, 1991). Gelombang pertama antara tahun 1828 hingga 1926, gelombang kedua tahun 1943 hingga tahun 1962, Sejak tahun 1974, menurutnya, dunia memasuki

gelombang ketiga demokratisasi dengan lebih banyak lagi negara menjadi demokratis. Gelombang demokratisasi ini juga diikuti arus balik di mana beberapa negara yang telah menjadi demokrasi kembali menjadi otoriter. Kendati demikian, gelombang demokratisasi selalu datang dan lebih banyak negara menjadi demokratis. Sulit untuk menolak tesis Hegelian yang didukung data historis ini. Demokrasi, meskipun ada arus balik, adalah suatu yang tak terelakkan dan bakal hadir bagi semua negara.

Indonesia adalah salah satu dari negara yang sedang memasuki gelombang ini. Setelah 32 tahun berkuasa, rezim Jenderal Soeharto yang kuat tiba-tiba runtuh pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi Asia. Kondisi politik Indonesia, bagaimanapun, masih belum jelas benar apakah kekuatan-kekuatan demokrasi akan menang. Masih sulit dibayangkan bahwa pemerintahan militer yang baru sekuat rezim lama bakal muncul kembali. Militer telah kehilangan harga diri yang serius dan menjadi sangat lemah setelah pengungkapan catatan buruk pelanggaran HAM yang diperbuatnya, dan masyarakat sipil telah semakin terorganisasi dan bersatu dalam menolak militer kembali ke kekuasaan.

Bagaimanakah sebuah sistem politik otoriter menjadi demokratis? Samuel Huntington mengenalkan empat model perubahan politik transformasi (*transformation*), penggantian (*replacement*), intervensi (*intervention*), dan transplasi (*transplacement*).

Model transisi yang pertama adalah transformasi. Dalam kasus ini, pemerintah meliberalisasi sistem politik yang ada. Demokratisasi datang dari atas. Transisi ini terjadi ketika negara (*state*) kuat dan masyarakat sipil (*civil society*) lemah. Transisi demokratisasi di Taiwan di awal tahun 1990-an mengikuti jalur ini dimana pemerintah Kuomintang menyelenggarakan sebuah pemilu demokratis untuk menghadirkan demokrasi di negara pulau itu.

Model transisi kedua adalah penggantian, di mana pemerintah dipaksa meyerahkan kekuasaannya dan digantikan oleh kekuatan-kekuatan oposisi. Demokratisasi muncul dari bawah. Transisi model ini terjadi ketika negara lemah dan masyarakat sipil kuat. Transisi demokrasi di Filipina, di mana Ferdinand Marcos dipaksa meninggalkan negerinya dan digantikan Cory Aquino, bisa diambil sebagai contoh dari transisi model ini.

Model ketiga adalah campuran antara transformasi dan penggantian karenanya disebut transplasi. Model ini terjadi karena pemerintah masih kuat dan kekuatan-kekuatan oposisi tidak cukup kuat untuk menggulingkan penguasa yang ada. Jadi sebuah proses negosiasi berlangsung antara pemerintah dan oposisi untuk menentukan transformasi sistem politik bertahap menuju sistem politik lebih demokratis. Di Palma (1990) menyebutnya sebagai perubahan yang dinegosiasikan, dimana elit baik pemerintahan maupun dari masyarakat sipil merundingkan perubahan politik. Polandia adalah salah satu contoh, di mana Serikat Buruh Solidaritas yang dipimpin Lech Walesa berunding dengan militer untuk mencapai demokrasi. Apa yang terjadi di Polandia adalah transisi menuju demokrasi melalui negosiasi.

Model keempat yang disebut Huntington adalah transisi menuju demokratisasi yang dipaksakan oleh kekuatan luar. Contoh kasus yang bagus adalah Panama, di mana tentara AS menahan presiden dari pemerintahan militer dengan tuduhan terlibat perdagangan obat terlarang. Selanjutnya, sebuah pemilu demokratis diselenggarakan untuk memilih pemerintah baru.

Dalam tesis Samuel Huntington tentang the third wave of democratization atau demokratisasi gelombang ketiga, Huntington menyebut tiga periode perkembangan demokrasi. Gelombang pertama, terjadi pada kurun waktu 1828-1926, dimulai di Eropa dan dipicu oleh

perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah kelompok kelas menengah oleh Huntington dianggap sebagai penyebab utama tumbuhnya demokrasi di sejumlah negara Eropa saat itu.

Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu 1943-1962 dan penyebab utamanya adalah faktor politik dan militer. Menyusul kemenangan pihak Sekutu pada Perang Dunia Kedua, beberapa negara kemudian beralih ke demokrasi. Gelombang kedua ini berlanjut di sejumlah negara yang baru merdeka menyusul proses dekolonisasi.

Demokratisasi gelombang ketiga dimulai tahun 1974 dengan faktor penyebab yang lebih kompleks dibandingkan dua gelombang terdahulu. Empat di antaranya adalah melemahnya legitimasi rejim otoriter, perkembangan di sektor ekonomi, dampak dari proses serupa di kawasan (*snowball effect*), dan tekanan dari luar. Huntington memberi sebutan gelombang ketiga (*third wave*) untuk proses demokratisasi yang terjadi mulai pertengahan 1970-an sampai awal 1990-an. Dimulai dari Revolusi Mawar di Portugal sampai dengan perubahan politik di negara-negara eks Blok Timur menyusul usainya Perang Dingin.

Meski demikian apa yang terjadi setelah itu masih tetap relevan dianggap sebagai kelanjutan dari gelombang ketiganya Huntington. Contohnya adalah proses demokratisasi di Indonesia. Dilihat dari faktor penyebabnya demokratisasi di Indonesia bermula dari melemahnya legitimasi rejim otoriter yang berkuasa mulai awal 1990-an.

Perkembangan di sektor ekonomi, yaitu kegagalan mengatasi krisis ekonomi tahun 1997, menjadi puncak dari perlemahan legitimasi tersebut. Faktor tekanan dari luar terlihat tidak begitu dominan. Namun dengan berkurangnya kepentingan negara adikuasa di Indonesia setelah runtuhnya blok komunis, bagi negara-negara maju mendukung rejim otoriter tidak lagi menjadi pilihan populer. Sistem politik global tidak lagi berpihak kepada rejim Orde Baru yang berkuasa saat itu.

Dilihat dari pola yang disusun Huntington, proses demokratisasi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *transplacements* dimana pemerintah dan oposisi bersama-sama mengusung proses demokratisasi. Mungkin penggolongan ini tidak sepenuhnya tepat mengingat sebelumnya konsep oposisi tidak dikenal di Indonesia. Meski demikian realita politik dewasa ini menunjukkan adanya kerjasama antara kelompok yang sebelumnya duduk di pemerintahan dan kelompok yang sebelumnya berada di luar pemerintahan.

Demokrasi seperti yang dipahami secara harafiah oleh masyarakat dianggap sebagai kebebasan berpikir dan berekspresi asalkan masih dalam koridor hukum yang diakui di negara Indonesia. Tetapi, setelah penulis melakukan penelitian di JSP yang notabene merupakan salah satu tempat kumpulan tulisan-tulisan sosial politik terbaik di Indonesia terdapat suatu dimensi-dimensi dalam memandang demokrasi. Ini menandakan bahwa tanpa disadari, demokrasi mungkin memang membebaskan manusia untuk berpikir dan berpendapat tentang sesuatu. Tetapi sesuatu hal tersebut akan kembali kepada kondisi lingkungan sang manusia yang berpikir tersebut sehingga dapat ditemukan suatu alur berpikir atau dimensi pemikiran yang sesuai dengan kondisi sekitar manusia tersebut.

Seperti yang kita semua ketahui, pada jaman Orba pemerintah mengaku bahwa mereka menganut demokrasi Pancasila, tetapi ketika melihat bukti dilapangan sangat sedikit sifat-sifat demokrasi yang muncul dan terasa oleh masyarakat. Dan tentu saja untuk mengganti sistem otoritarianisme Orba maka sistem politik demokrasi lah yang dipilih dan dianggap sebagai sistem yang terbaik untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya demokrasi ternyata merubah kebiasaan-kebiasaan sosial-politik yang dulu waktu Orba biasa atau normal menjadi dilarang atau diminimalkan seperti contohnya: peran militer dalam politik, bisnis militer, sumber-sumber media milik negara, pemerintahan terpusat dan hanya dikuasai oleh orang dekat penguasa saja, dan sebagainya.

Hal-hal inilah yang akhirnya membentuk proses berpikir para akademisi di JSP untuk mengkritisi ataupun memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan spesialisasi mereka. Dan ternyata memang dimensi yang dimunculkan dalam JSP ini sesuai dengan dimensi-dimensi yang dulu tidak adakan atau di khususkan aksesnya pada jaman Orba.

Diantara duapuluh dua (22) penulis yang tulisannya penulis jadikan bahan penelitian, ternyata terdapat beberapa dimensi dalam memandang permasalahan-permasalahan demokrasi. Penulis melihat ada empat dimensi (4) yang muncul dalam penelitian ini, yakni: (1). Demokrasi Sektor Militer. Reformasi sektor militer adalah teriakan pertama dan yang paling keras dari seluruh elemen masyarakat Indonesia dikala demonstrasi besar-besaran di tahun 1998 lalu. Sektor militer memang merupakan sektor yang sangat disukai dan di anak emaskan dalam era Orde baru, mungkin dikarenakan background pemimpin Orba yang berasal dari militer atau karena militer merupakan anak Ideologis negara karena tugasnya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara serta hanya diperbolehkan untuk memiliki satu ideologi saja yakni nasionalisme. Di JSP, akademisi yang menulis terkait masalah demokrasi sektor militer ada Prof. Jahja A. Muhaimin dan Arie Sujito yang secara lugas dan tegas membeberkan terkait tentang proses demokratisasi Indonesia di sektor militer. Kekuasaan militer atas bidang non-pertahanan dan keamanan dalam demokrasi tidak diperbolehkan dikarenakan prinsip demokrasi adalah bagaimana supremasi sipil dapat ditegakkan dan sipil tidak dapat diintervensi oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam setiap tindakan politik mereka. (2). Demokrasi Sektor Media dan Komunikasi. Saat era reformasi lahir, hal yang paling kentara terasa adalah kebebasan pers dan media di Indonesia. Keran informasi dan kebebasan pers dibuka sebesar-besarnya serta partisipasi masyarakat dalam masalah politik menjadi hal yang sangat umum untuk diminta dan ditanggapi oleh masyarakat. Di JSP, akademisi yang menulis terkait permasalahan Demokrasi sektor media dan komunikasi berjumlah tujuh orang, yakni I Gusti Ngurah Putra, Ana Nadhya Abrar, Ashadi Siregar, Susilastuti D.N, Hermin Indah Wahyuni, Puji Rianto, dan Nunung Prajarto. (3). Demokrasi Sektor Sistem Politik. Pada saat pertama kali hadir pasca Orde baru, Demokrasi menjadi pilihan utama sebagai sistem politik Indonesia untuk menggantikan “Demokrasi Pancasila” atau yang kita akui sebagai rejim otoritarianisme karena demokrasi sebagai suatu sistem politik secara tidak langsung berhasil untuk mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada dalam setiap masyarakat di suatu negara. Indonesia melihat demokrasi sebagai pintu keluar dari jeratan tekanan dan terlihat paling pantas untuk diterapkan karena sesuai dengan semangat HAM dan tidak mendeskreditkan segala bentuk pemikiran dari masyarakatnya. Meskipun begitu, demokrasi kedepannya dituntut untuk melakukan penyempitan akses dikarenakan demokrasi juga tidak selamanya menjamin suatu negara menjadi lebih baik daripada era sistem politik sebelumnya apabila batasan-batasan demokrasi tersebut belum jelas. Penulis yang menulis permasalahan ini ada Eric Hiariej, Pratikno, Janianton Damanik, Kurniawan Kunto Yuliarso dan Muhammad Faishal. (4). Demokrasi Sektor Civil Society. Civil Society dan demokrasi ibarat "*the two side at the same coin*". Artinya jika civil society kuat maka demokrasi akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya jika demokrasi bertumbuh dan berkembang dengan baik, civil society akan bertumbuh dan

berkembang dengan baik. Itu pula sebabnya para pakar mengatakan civil society merupakan rumah tempat bersemayamnya demokrasi.

Menguatnya civil society saat ini sebenarnya merupakan strategi yang paling ampuh bagi berkembangnya demokrasi, untuk mencegah hegemoni kekuasaan yang melumpuhkan daya tampil individu dan masyarakat. Dalam praktiknya banyak kita jumpai, individu, kelompok masyarakat, elite politik, elite penguasa yang berbicara atau berbuat atas nama demokrasi, walau secara esensial justru sebaliknya.

Kesadaran masyarakat akan demokrasi bisa dibeli dengan uang. Kelompok masyarakat tertentu diatur untuk bertikai demi demokrasi. Perseteruan eksekutif dan legislatif saat ini sebenarnya tidak kondusif bagi pemulihan ekonomi kita, tetapi hal itu tetap dilakukan demi demokrasi.

Keterlibatan warga dalam keputusan-keputusan politik akan efektif apabila tersedia ruang yang cukup luas dalam hubungan rakyat dengan negara. Ruang partisipasi ini disebut sebagai ruang publik (*public sphere*). Melalui ruang publik inilah, individu atau asosiasi warga masyarakat mengaktualisasikan aspirasinya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan negara. Negara yang menyediakan ruang publik yang cukup luas dan masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut untuk berinteraksi dengan negara inilah yang akhirnya membentuk sebuah masyarakat sipil (*civil society*).

Akademisi yang menulis tentang permasalahan ini ada Bob Sugeng Hadiwinata, Afan Gaffar, Cornelis Lay, dan Endi Haryono.

Kesimpulan

Di dimensi demokrasi militer ada Jahja A. Muhaimin dan Arie Sujito yang sudah terpublish jurnalnya di JSP. Kesimpulan dari para akademisi yang memandang dari dimensi demokrasi militer adalah dengan semakin demokratisnya suatu negara, maka fungsi militer akan semakin terkhususkan yakni ke fungsi pertahanan dan keamanan sedangkan dalam birokrasi dan Pembuat *public policy* akan dikuasai oleh sipil sebagai elemen utama dalam adanya sistem demokrasi.

Sedangkan dalam dimensi demokrasi sektor media dan komunikasi, ada I Gusti Ngurah Putra, Ana Nadhya Abrar, Ashadi Siregar, Susilastuti D.N, Hermin Indah Wahyuni, Puji Rianto, dan Nunung Prajarto. Kesimpulan dari tulisan para akademisi yang menggunakan kaca mata demokrasi media dan komunikasi adalah media komunikasi sebagai garda terdepan dalam demokrasi harus bisa lebih independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghubung antara penguasa dan rakyatnya. Media dituntut untuk tidak lagi menggunakan spirit neoliberalisme dalam setiap tindak tanduknya dikarenakan dengan menggunakan spirit neoliberalisme maka bukan kualitas pemberitaan yang jadi penting melainkan daya jual berita yang lebih diutamakan. Dengan media komunikasi yang mengeluarkan informasi atau acara yang tepat dan baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, niscaya bangsa Indonesia ini akan benar-benar menjadi bangsa yang efektif, cerdas dan maju.

Dalam demokrasi di bidang sistem politik, ada Eric Hiariej, Pratikno, Janianton Damanik, Kurniawan Kunto Yuliarso dan Muhammad Faishal yang memiliki kaca mata analisa demokrasi sebagai sistem politik negara. Kesimpulan dari pandangan mereka ialah demokrasi sebagai sebuah sistem negara menawarkan hal yang baru dan menarik buat bangsa Indonesia, tetapi jangan lupa bahwa demokrasi pun memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu harus

ada kajian mendalam terkait demokrasi sehingga akan muncul nantinya suatu sistem politik yang berasaskan demokrasi tetapi bercita rasa Indonesia sehingga kita tidak lagi terkungkung dalam demokrasi liberal seperti saat ini.

Sedangkan dalam dimensi terakhir, yakni demokrasi dalam civil society mengindikasikan bahwa para akademisi yang menggunakan kacamata ini yakni Bob Sugeng Hadiwinata, Afan Gaffar, Cornelis Lay, dan Endi Haryono menginginkan adanya kedewasaan masyarakat Indonesia dalam memandang suatu civil society dikarenakan tidak seluruh civil society merupakan perwakilan masyarakat yang menginginkan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Jangan lupa, dengan membebaskan gaya berpikir masyarakat maka demokrasi tidak akan bisa mengontrol seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung demokrasi, mereka pun bisa mendapatkan buah simalakama andaikata ada gerakan *massive* yang berorientasikan civil society tapi untuk menolak demokrasi.

Dan dengan mengacu kepada teori *Third Wave Democracy* dari Huntington, dapat dipeahami pula bahwa sudut pandang para akademisi JSP sesuai dengan teori tersebut sehingga Indonesia dapat dikatakan cukup lama dalam memulai demokrasi dan sedang dalam jalur yang tepat untuk mencapai demokrasi yang benar dan baik.

Daftar Pustaka

- As'ad Said Ali, "*Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*", (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 99
- Dadang Juliantara, "*Negara Demokrasi Untuk Indonesia*", Pondok Edukasi, Solo, 2002
- David Held, "*Models of Democracy*", (Cambridge: Polity Press, 1992), hlm. 52.
- Diane Revitch & Abigail Thernstorm, "*Demokrasi Klasik & Modern*", Buku Obor, Jakarta, 1994. Hlm.1 & 11-12
- Eman Hermawan & Umaruddin Masdar, "*Demokrasi untuk Pemula*", Yogyakarta: KLIK, 2000, hlm. 28-29.
- F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif "*Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*", Kanisius, Yogyakarta, 2009. Hlm.
- Frank Cunningham, "*Theories Of Democracy*", Routledge, London, 2002. Hlm.11
- Gregorius Sahdan, "*Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*", (Yogyakarta: PONDOK EDUKASI, 2004), hlm. 12.
- Hadari Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hal.30.
- Howard zinn, "*How Democratic is America*", dalam Journal Political Science, University of Wisconsin (1969): hlm. 1.
- Joseph A. Schumpeter, "*Capitalism, Socialism and Democracy*", Routledge, USA, 2003. hlm.250.
- Laith Kubba, "*Recognizing Pluralism*", dalam Journal of democracy, Vol, 7, no. 2 (1996): 86-89.
- M. Fadjoel Rachman, "*Demokrasi Partisipatif dan Kepemimpinan Politik Baru*", dalam M. Fadjoel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan, Depok: Koekoesan, 2007, 302.

- M. Zaki Mubarak, "Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia", Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no. 3 (2007), 66.
- Ma'mun Murod Al-Brebesy, "Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara", hlm. 60.
- Mardalis, "Metoda Penelitian", Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal.26.
- Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 51.
- Mohtar Maso'ed, "Negara, Kapital, dan Demokrasi", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24.
- Nadia Urbinati, *Representative Democracy "Principles & Genealogy"*, Chicago: The University of Chicago Press (2006), hlm. 17.
- Philippe C. Schmitter & Terry Lynn Karl, "What Democracy Is... And Is Not", dalam Project Muse, John Hopkins University Press (1991): hlm. 115.
- Sartono Kartodirdjo, "Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial", Jakarta: LP3ES, (1986), hlm. 28.
- Samuel P. Huntington, "Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century". Norman, OK: University of Oklahoma Press: Norman Oklahoma. 1991.
- Wirjono Prodjodikoro, "Asas-asas Ilmu Negara dan Politik", PT. Eresco Jakarta Bandung, 1981. Hlm. 24-25
- http://www.yorku.ca/horowitz/courses/lectures/39_mill_liberalism_democracy.html (diakses tanggal 8 Oktober 2014)
- <http://www.amielandmelburn.org.uk/articles/bernstein.htm> (diakses tanggal 1 Desember 2014)
- <http://www.politicseymru.com/en/cat4/article35> (diakses tanggal 4 Desember 2014)
- <http://blogs.arts.auckland.ac.nz/politics-214-314/files/2011/04/Max-Weber-on-democracy.pdf> (Diakses tanggal 4 Desember 2014)